



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASIH HARIYATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO**
3. NHK : **769149**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/71 m2 di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 173 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **433.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, SUZUKI ADDRESS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, SUZUKI ADDRES MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **30.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **238.500.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.351.500.000**

III. HUTANG Rp. **468.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.883.500.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.